

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Literasi

1. Pengertian Literasi

Menurut Kirsch & Jungeblut dalam buku *Literacy Profile of America's Young Adult* mendefinisikan literasi sebagai kemampuan seseorang dalam menggunakan informasi untuk mengembangkan pengetahuan sehingga mendatangkan manfaat bagi masyarakat.⁹ Melalui kemampuan literasi, seseorang tidak saja memperoleh ilmu pengetahuan tetapi juga bisa menggunakan ilmu pengetahuan dan pengalamannya untuk dijadikan rujukan di masa yang akan datang.¹⁰

Keterampilan literasi memiliki pengaruh penting bagi keberhasilan seseorang. Keterampilan literasi yang baik akan membantu seseorang dalam memahami informasi baik lisan maupun tertulis. Namun literasi tidak hanya sekedar kemampuan membaca dan menulis, tetapi literasi berarti melek teknologi, politik, berpikir kritis, dan peka terhadap lingkungan sekitar.

Literasi yang komprehensif dan saling terkait ini menampukkan seseorang untuk berkontribusi kepada

⁹ Kirsch & Jungeblut, "*Literacy Profile of America's Young Adult*" Book.

¹⁰ Oktariani Oktariani and Evri Ekadiansyah, "Peran Literasi Dalam Pengembangan Kemampuan Berpikir Kritis," *Jurnal Penelitian Pendidikan, Psikologi Dan Kesehatan (J-P3K)* 1, no. 1 (2020): 23–33.

masyarakatnya sesuai dengan kompetensi dan perannya sebagai warga negara global (*global citizen*). Dalam konteks Indonesia, kelima keterampilan tersebut perlu diawali dengan literasi usia dini yang mencakup fonetik, alfabet, kosakata, sadar dan memaknai materi cetak (*print awareness*), dan kemampuan menggambarkan dan menceritakan kembali (*narrative skills*).¹¹

Peran literasi ekonomi dan literasi keuangan dapat menjadi masukan untuk pengambilan keputusan keuangan yang efektif, juga mempengaruhi bagaimana perilaku dan kinerja individu, masyarakat dan pelaku ekonomi dalam mengelola keuangan pribadi mereka.

Literasi keuangan Islam adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengetahuan keuangan, keterampilan dan sikap dalam mengelola sumber keuangan sesuai dengan ajaran Islam. Literasi produk keuangan syariah dapat menghasilkan banyak keuntungan besar khususnya pada jasa keuangan syariah dan jasa keuangan umumnya.

Masyarakat dan lembaga jasa keuangan syariah memiliki hubungan yang saling membutuhkan satu sama lain sehingga semakin tinggi tingkat literasi produk keuangan syariah masyarakat, maka semakin banyak

¹¹ Dispusip, "Konsep Dasar Literasi," Jakarta: Universitas Terbuka. [Online] Diakses Dari ..., 2019, 1-14, <https://dispusip.pekanbaru.go.id/konsep-dasar-literasi/>.

masyarakat yang akan memanfaatkan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah.

Indikator yang terdapat dalam literasi keuangan syariah yang pertama Pengetahuan, merupakan salah satu aspek yang harus dimiliki seseorang dalam konsep literasi keuangan agar dapat mengelola keuangan dengan baik. hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraannya, yang kedua kemampuan, seseorang memiliki tingkat literasi yang tinggi maka dia mampu menciptakan keputusan keuangan yang baik. Pengambilan keputusan menjadi salah satu yang paling penting dalam konteks literasi keuangan. yang terakhir kepercayaan, tidak semua orang mampu dalam kepercayaan diri pada saat merencanakan kebutuhan jangka panjang.¹²

2. Tujuan Literasi

- a. Literasi adalah mengembangkan kemampuan strategi dan keterampilan yang tepat dalam memanfaatkan beragam media. Literasi juga bertujuan agar seseorang mampu menerapkannya dalam berbagai kepentingan, konteks keilmuan, budaya, situasi, maupun media yang berbeda.
- b. Literasi berkaitan dengan pengembangan hasil penelitian, yaitu agar seseorang mampu merumuskan

¹² Putri Nuraini et al., “Terhadap Minat Menggunakan Produk Bank Syariah,” *Jurnal Tabarru’ : Islamic Banking and Finance Volume 6 Nomor 1, Mei 2023 p-ISSN 6* (2023).

ide-ide secara kreatif, memecahkan masalah secara efektif, serta menggunakan keterampilan berpikir tingkat tinggi.

- c. memecahkan masalah, mengeksplorasi pengetahuan Literasi adalah menanamkan kepada masyarakat tentang nilai dan kekuatan literasi, sehingga masyarakat termotivasi untuk berliterasi sepanjang hidup serta menyadari bahwa melalui literasi mereka dapat, dan memberikan pengaruh terhadap lingkungan maupun dunia.
- d. Literasi adalah mengembangkan kemandirian masyarakat yang kreatif, inovatif, produktif, serta berkarakter. Dengan tercapainya tujuan ini , diharapkan masyarakat mampu menggali makna secara mendalam, mengembangkan pendirian, serta melatih kemampuan berpikir kritis dalam menyampaikan pendapat.¹³

3. Jenis Jenis Literasi

- a. Literasi Baca Tulis, merupakan pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan

¹³ Reni Kusmiarti and Syukri Hamzah, “Literasi Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Di Era Industri 4.0,” Prosiding Seminar Nasional Bulan Bahasa (Semiba) 1, no. 1 (2019): 211–22,

pemahaman dan potensi, serta untuk berpartisipasi di lingkungan sosial.

- b. Literasi Numerasi, merupakan pengetahuan dan kecakapan untuk bisa memperoleh, menginterpretasikan, menggunakan, dan mengomunikasikan berbagai macam angka dan simbol matematika.
- c. Pada Literasi Sains, merupakan pengetahuan dan kecakapan ilmiah untuk mampu mengidentifikasi pertanyaan, memperoleh pengetahuan baru, menjelaskan fenomena ilmiah, serta mengambil simpulan berdasarkan fakta, memahami karakteristik sains, membangun kesadaran bagaimana sains dan teknologi membentuk lingkungan alam, intelektual dan budaya.
- d. Literasi Digital, merupakan pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi.
- e. Literasi Finansial, pengetahuan dan kecakapan untuk mengaplikasikan pemahaman tentang konsep dan risiko, keterampilan, dan motivasi dan pemahaman agar dapat membuat keputusan yang efektif.

- f. Literasi Budaya dan Kewarganegaraan, merupakan pengetahuan dan kecakapan dalam memahami dan bersikap terhadap kebudayaan Indonesia.¹⁴
- g. Literasi Dasar (*Basic Literacy*), yaitu kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan menghitung. Dalam literasi dasar, kemampuan untuk mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan menghitung (*counting*) berkaitan dengan kemampuan analisis untuk memperhitungkan (*calculating*), mempersepsikan informasi (*perceiving*), mengomunikasikan, serta menggambarkan informasi (*drawing*) berdasarkan pemahaman dan pengambilan kesimpulan pribadi.
- h. Literasi Media (*Media Literacy*), yaitu kemampuan untuk mengetahui berbagai bentuk media yang berbeda, seperti media cetak, media elektronik (media radio, media televisi), media digital (media internet), dan memahami tujuan penggunaannya.

B. Pengabdian Masyarakat

Program pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi adalah salah satu dari implementasi Tridharma perguruan tinggi. Program ini dilaksanakan dalam berbagai bentuk misalnya pendidikan dan

¹⁴ Deti Nudiati, "Literasi Sebagai Kecakapan Hidup Abad 21 Pada Mahasiswa," *Indonesian Journal of Learning Education and Counseling* 3, no. 1 (2020): 34–40.

pelatihan masyarakat, pelayanan masyarakat, dan kaji tindak dari Iptek yang dihasilkan oleh perguruan tinggi. Tujuan program ini adalah menerapkan hasil-hasil Iptek untuk pemberdayaan masyarakat sehingga menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dari kelompok masyarakat sasaran.

Bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi (PT) adalah pendidikan dan pelatihan masyarakat, pelayanan masyarakat, dan kaji tindak dari iptek yang dihasilkannya. Manfaat program pengabdian masyarakat bagi pelaksanaan pendidikan di perguruan tinggi adalah untuk pengembangan kelembagaan dan mutu pendidikan, mahasiswa mampu mengidentifikasi serta memberi solusi suatu masalah sebagai dasar analisis dalam menyikapi fenomena masyarakat, melatih calon sarjana untuk terjun di masyarakat, mengembangkan IPTEK.¹⁵

Sebaliknya kegiatan pengabdian pada masyarakat yang telah dilakukan perlu diteliti sebelumnya untuk diketahui seberapa manfaat yang diperoleh, kendala apa yang terjadi serta hal-hal apa yang perlu ditindak lanjuti guna memperkaya dan mendukung kegiatan pendidikan dan pengajaran. Demikian juga sebelum melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilakukan kegiatan penelitian

¹⁵ Idris HM Noor, "Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Pada Perguruan Tinggi," *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan* 16, no. 3 (2010): 285–97, <https://doi.org/10.24832/jpnk.v16i3.462>.

terhadap obyek sasaran guna mengetahui permasalahan serta kebutuhan yang benar-benar diperlukan.

Penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan oleh Lembaga penelitian, Fakultas, Jurusan, Program Studi, Labotarium, Kelompok Dosen, Dosen secara perseorangan ataupun mahasiswa. Peran atau fungsi Lembaga Pengabdian kepada masyarakat (LPM) adalah mengkoordinasikan semua kegiatan pengabdian kepada masyarakat serta mengusahakan sumber daya yang diperlukan. Dalam pelaksanaannya di lapangan, yang menjadi khalayak sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut dapat dipilah dalam :

1. Perorangan

Setiap orang dalam memenuhi kebutuhannya dan dalam hidup bermasyarakat pasti memiliki permasalahan dan hambatan. Permasalahan dan hambatan tersebut dapat berkaitan dengan keterbatasan pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan, pola pikir dan sebagainya yang semuanya itu memerlukan bantuan pihak lain.

2. Kelompok

Kiranya masih banyak kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat yang masih memerlukan pembinaan, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan guna meningkatkan kemajuannya. Kelompok ini antara lain kelompok pedagang kaki lima dan kelompok pedagang kecil lainnya,

kelompok pengrajin dan industri rumah tangga, kelompok pengajian, kelompok petani dan peternak

3. Komunitas

Komunitas dalam arti luas meliputi komunitas pedesaan dan perkotaan yang secara sosial ekonomis masih tertinggal sehingga masih memerlukan pembinaan, peningkatan dan pengembangan. Termasuk dalam komunitas ini adalah mereka memiliki potensi yang belum dimanfaatkan atau dikembangkan sehingga diperlukan bimbingan, pelatihan dan pembinaan guna mencapai kemajuan.

4. Lembaga

Lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat diduga masih banyak yang memerlukan bantuan keahlian, keterampilan, dan pembinaan dalam melaksanakan tugas dan program kerjanya.

Pemilihan khalayak sasaran tersebut tentunya disesuaikan dengan tingkat perkembangan dan kemampuan perguruan tinggi, serta sesuai dengan permasalahan yang relevan dengan bidang keahlian yang dimiliki dan dikembangkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.¹⁶

Dalam melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat (PPM) ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain :

¹⁶ Herlina Emilia, "Diterapkan Oleh Perguruan Tinggi" 2, no. 3 (2022): 122–30.

1. Kegiatan pembinaan, bimbingan dan bantuan hendaknya tidak menyebabkan terjadinya sinterklas, sebaliknya diusahakan adanya pola pikir ke arah kemandirian sehingga bantuan yang diberikan hendaknya memerlukan stimulan guna menggali partisipasi warga masyarakat.
2. Kegiatan pengabdian dilakukan secara prosedural, dan dikoordinasikan oleh Lembaga pengabdian kepada masyarakat (LPM) sehingga semua kegiatan pengabdian hendaknya diketahui Lembaga pengabdian kepada masyarakat (LPM).
3. Setiap kegiatan Pengabdian kepada masyarakat dibuatkan surat keputusan atau surat tugas dan setelah selesai kegiatan dibuatkan surat keterangan telah menjalankan tugas.¹⁷

C. Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah

1. Pengertian Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah

PT. Bank Tabungan Negara Syariah merupakan Unit Usaha Syariah (UUS) dari Bank Tabungan Negara Konvensional yang merupakan BUMN, yang menjalankan bisnis berdasarkan prinsip syariah. BTN Syariah mulai beroperasi pada tanggal 14 Februari 2005 dengan Kantor Cabang Syariah yang pertama di Jakarta.

¹⁷ Sukidjo, "Tujuan Dan Khalayak Sasaran PPM," *Aplikasia, Jurnal Aplikasi Ilmu-Ilmu Agama* 1, no. 1 (2000): 62–78.

PT. Bank Tabungan Negara Syariah yang merupakan bagian dari Bank Bank Tabungan Negara Konvensional yang merupakan Bank BUMN . sesuai dengan Mottonya **”Maju dan Sejahtera Bersama”** maka Bank Tabungan Negara Syariah mengutamakan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam penerapan imbalan bagi hasil antara nasabah dan bank.¹⁸

Bank Tabungan Negara(BTN) Syariah merupakan sebuah lembaga keuangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atas transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa pembayaran lalu lintas. Salah satu peran penting Bank Tabungan Negara syariah (BTN) Syariah adalah melakukan kegiatan penghimpun dana dan menyalurkannya untuk masyarakat.¹⁹

BTN Syariah merupakan bank syariah yang memiliki asset cukup besar diantara beberapa bank syariah atau lembaga keuangan syariah lainnya. BTN Syariah adalah lembaga keuangan yang merupakan prinsip bagi hasil dalam menjalankan perannya sebagai lembaga intermediasi keuangan, yaitu lembaga yang memiliki peran sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya

¹⁸ Gambaran Umum et al., “Bab Iii Gambaran Umum Pt. Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Bekasi 3.1,” no. 10 (2009): 27–37.

¹⁹ Hendri Cahyono, “Analisis Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Tabungan Negara Syariah KCP Indramayu,” *Journal of Economics, Management and Finance* 1, no. 1 (2022): 21–28.

kembali ke masyarakat, Murabahah merupakan salah satu pembiayaan bank syariah yang melalui sistem jual-beli untuk jasa dengan kesepakatan keuntungan dan jangka waktu tertentu. Mekanisme ini sudah biasa digunakan untuk kebutuhan modal kerja atau sebuah kepemilikan barang dengan cara mencicil.²⁰

Dalam pelaksanaan kegiatannya, Unit Usaha Syariah didampingi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertindak sebagai pengawas, penasehat dan pemberi saran kepada Direksi, Pimpinan Divisi Syariah, dan Pimpinan Kantor Cabang Syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan prinsip syariah.

DPS memiliki tanggung jawab sebagai berikut: memberikan penilaian terhadap Pedoman Syariah tentang petunjuk operasional serta produk yang ditawarkan oleh perbankan, melakukan pengawasan tahapan perkembangan produk baru sehingga selaras pada fatwa DSN-MUI, meminta fatwa dari DSN-MUI guna produk perbankan baru yang belum memiliki fatwa, meninjau pemenuhan Prinsip Syariah tentang mekanisme untuk mengumpulkan dana, menyalurkan dana, layanan perbankan meminta data dan

²⁰ Heri Susanto, Eka Dewi Sumarmawati, and Nur Kholis, "Karakteristik Penentu Pembiayaan Murabahah Pada Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah," *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam* 2, no. 2 (2016): 21–27, <https://doi.org/10.20885/jeki.vol2.iss2.art3>.

informasi terkait aspek syariah dari divisi perbankan syariah dalam menjalankan tugasnya.²¹

Pada tanggal 15 Desember 2004, Bank BTN menerima surat persetujuan dari BI, Surat No. 6/1350/DPbs perihal persetujuan BI mengenai prinsip KCS (Kantor Cabang Syariah) Bank BTN. Maka tanggal inilah yang diperingati secara resmi sebagai hari lahirnya BTN Syariah. Yang secara 38 sinergi melalui persetujuan dari BI dan Direksi PT. BTN maka dibukalah KCS Jakarta pada 14 Februari 2025.

Visi Bank BTN Syariah "Menjadi Strategic Business Unit BTN yang sehat dan terkemuka dalam penyediaan jasa keuangan syariah dan mengutamakan kemaslahatan bersama."

Misi Bank BTN Syariah

- a. Mendukung pencapaian sasaran laba usaha BTN Syariah.
- b. Memberikan pelayanan jasa keuangan Syariah yang unggul dalam pembiayaan perumahan dan produk serta jasa keuangan Syariah terkait sehingga dapat memberikan kepuasan bagi nasabah dan memperoleh pangsa pasar yang diharapkan

²¹ Noor Budiarsih and Sri Mulyati, "Pengaruh Keragaman Pada Dewan Direksi Dan Dewan Pengawas Syariah Terhadap Risiko Kredit Di Bank Syariah," *Selekta Manajemen: Jurnal Mahasiswa Bisnis* 02, no. 03 (2023): 130–47, <https://journal.uui.ac.id/selma/article/view/29653>.

- c. Melaksanakan manajemen perbankan yang sesuai dengan prinsip Syariah sehingga dapat meningkatkan ketahanan BTN dalam menghadapi perubahan lingkungan usaha serta meningkatkan shareholders value.
- d. Memberi keseimbangan dalam pemenuhan kepentingan segenap stakeholders serta memberikan ketentraman pada karyawan dan nasabah.²²

2. Produk Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah

KPR BTN Syariah sebagai suatu produk pembiayaan perumahan oleh Bank Tabungan Negara (BTN) dengan berlandaskan prinsip Syariah. BTN, sebagai salah satu bank terkemuka di Indonesia, berkomitmen untuk mendukung kebutuhan perumahan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, skema pembiayaan yang diterapkan dalam produk KPR bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam memiliki rumah dengan biaya yang terjangkau dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.²³

²² Riska Ariana, "Analisis Pengaruh Inflasi, Jumlah Uang Beredar, Dan Nilai Tukar Rupiah (IDR/USD) Terhadap Nilai Indeks Harga Shama Gabungan (IHGS) Periode 2015-2019," no. 29 (2016): 1–23.

²³ Ibnu Syawali Manurung, "Starategi Pemasaran Bank BTN Syariah Untuk Meningkatkan Nasabah Terhadap Produk KPR Pada BTN Syariah Setiabudi Menggunakan Analisis Soar," *Maslahah: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Syariah* 2, no. 2 (2024): 342–55.

Di Indonesia, saat ini dikenal ada 2 jenis KPR

1. KPR Subsidi, yaitu suatu kredit yang diperuntukkan kepada masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah dalam rangka memenuhi kebutuhan perumahan atau perbaikan rumah yang telah dimiliki. Kredit subsidi ini diatur tersendiri oleh Pemerintah, sehingga tidak setiap masyarakat yang mengajukan kredit dapat diberikan fasilitas ini.
2. KPR Non Subsidi, yaitu suatu KPR yang diperuntukkan bagi seluruh masyarakat.

Ada 3 tahapan akad dalam pembiayaan murabahah perumahan BTN Syariah yaitu Akad wakalah adalah akad penunjang yang berfungsi untuk memberikan hak kepada nasabah untuk mewakili bank dalam membeli rumah kepada pihak pengembang. Akad murabahah pertama adalah agar rumah secara prinsip menjadi milik bank (bank membeli kepada pengembang) dan dapat dijual kepada nasabah yang lalu dilanjutkan akad murabahah kedua sebagai akad penjualan rumah dengan cicilan kepada nasabah.²⁴

Dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah, BTN Syariah melakukan analisis pembiayaan guna mengetahui apakah nasabah layak atau tidak diberikan pembiayaan tahapan-tahapan yang dilakukan oleh

²⁴ Shiska Trianziani, "View Metadata, Citation and Similar Papers at Core.Ac.Uk" 4, no. November (2020): 274–82.

BTN Syariah dalam menganalisis pembiayaan kepemilikan rumah didasarkan pada rumus 5C:

1. *Character*

Merupakan sifat atau watak seseorang, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar harus dapat di percaya. Keyakinan ini tercermin dari bagaimana sifatnya, kejujurannya, tidak pemabuk, tidak penjudi, usia debitur dan lain-lain.

2. *Capacity*

Digunakan untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar pembiayaan yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuan mencari laba, dimana diteliti mengenai pendidikan dan pengalaman usahanya, reputasi usaha, riwayat usaha, keahliannya dalam bidang usaha tersebut sehingga bank memperoleh keyakinan bahwa nasabah yang diberikan pembiayaan adalah orang yang tepat.

3. *Capital*

Adalah berkaitan dengan modal atau kekayaan yang dimiliki calon nasabah untuk menjalankan dan memelihara kelangsungan usahanya.

4. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang di berikan, jaminan yang harus di teliti kehabsaannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat di pergunakan

5. *Condition of Economic*

Adalah keadaan sosial ekonomi suatu saat yang mungkin dapat mempengaruhi maju mundurnya usaha calon nasabah.²⁵

Bagi nasabah yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan KPR BTN Syariah secara umum yang harus dipenuhi oleh nasabah adalah:

1. Mengisi formulir permohonan pembiayaan,
2. Menyerahkan copy identitas diri (KTP, KK, dan akta nikah).
3. Menyerahkan copy slip/keterangan gaji atau Keterangan Kerja dari Perusahaan.
4. Menyerahkan copy rekening tabungan bank atau BTN dan atau bank lain.

²⁵ M Robby Kaharudin, “Analisis Kelayakan Nasabah Dalam Pemberian Pembiayaan Kepemilikan Rumah Di Btn Syariah Cabang Palembang,” *ADL ISLAMIC ECONOMIC : Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2020): 181–202, <https://doi.org/10.56644/adl.v1i2.21>.

5. Surat kuasa pemotongan gaji untuk pembayaran angsuran kolektif yang telah ditandatangani oleh pimpinan atau bendaharawan instansi (jika ada).
6. Menyerahkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB),
7. Menyerahkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB.
8. Serta NPWP untuk pembiayaan Rp. 50 juta.

Adapun syarat-syarat secara umum adalah sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia (WNI.)
2. Usia minimal 21 tahun atau sudah menikah.
3. Pada saat pembiayaan lunas usianya tidak
4. lebih dari 65 tahun.
5. Masa kerja minimal 1 (satu) tahun.
6. Tidak memiliki kredit atau pembiayaan bermasalah.
7. Permohonan yang masih berstatus sebagai nasabah di Bank untuk jenis pembiayaan apapun
8. Sesuai ketentuan Bank penghasilannya masih mencukupi untuk membayar kewajiban (angsuran pokok dan margin) atas seluruh pembiayaan (baik yang telah ada maupun yang akan ada).
9. Menyampaikan NPWP pribadi untuk pemohon dengan jumlah pembiayaan Rp. 50 juta sampai dengan

Rp. 100 juta atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.²⁶

Adapun produk-produk tabungan yang pada dasarnya menggunakan akad mudharabah pada Bank BTN Syariah yaitu:

1) Produk BTN Prima iB

Produk BTN Prima iB Produk tabungan dengan menggunakan akad Mudharabah Mutlaqah (investasi), yang merupakan kerja sama antara dua pihak. Pihak pertama (shahibul maal) menyediakan modal dan memberikan kewenangan penuh kepada pihak lainnya (mudharib) dalam menentukan jenis dan tempat investasi. Keuntungan dan kerugian dibagi menurut nisbah yang disepakati dimuka.

2) Produk BTN Haji & Umroh iB

Produk tabungan untuk mewujudkan impian ibadah haji melalui program haji regular dengan menggunakan akad Mudharabah Mutlaqah (investasi), bank memberikan bagi hasil yang menguntungkan dan kompetitif.

3) Produk Tabungan BTN Qurban iB

²⁶ Fajar Sodik, Rikhadatun Abir Al Farda, and Elisa Ayuni, "Penerapan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan KPR (Studi Kasus Bank BTN Syariah Keps Pekalongan)," *IQTISADIE: Journal of Islamic Banking and Shariah Economy* 3, no. 1 (2023): 19–44, <https://doi.org/10.36781/iqtisadie.v3i1.388>.

Produk tabungan untuk mewujudkan niat ibadah qurban dengan menggunakan akad Mudharabah Mutlaqah (investasi), bank memberikan bagi hasil yang menguntungkan dan kompetitif.

4) Produk Tabungan BTN Emas iB

Produk tabungan dengan menggunakan akad Murabahah (Jual Beli), dimana bank menjual emas kepada nasabah dengan harga jual yang telah disepakati yang mencakup harga modal bank dan keuntungan yang disepakati. Nasabah kemudian membayar harga tersebut secara angsuran atau tunai.

5) Tabunganku iB

Tabunganku IB adalah tabungann akad wadi,ah (titipan), bank dapat memberikan bonus yang menarik. Diterbitkan secara bersama-sama oleh bank-bank Indonesia guna membutuhkan budaya menabung sera meningkatkan kesejahteraan masyarakat

6) Giro BTN Ib

Produk simpanan dengan prinsip” Wadiah” (titipan), bank dapat memberikan bonus yang menguntungkan bagi Nasabah atas simpanannya guna memperlancar aktivitas bisnis.

7) Pembiayaan Kendaraan Bermotor BTN iB

Pembiayaan kepada nasabah perorangan dengan akad Murabahah (jual beli) dalam rangka pembelian

kendaraan bermotor yang diperuntukkan untung kepentingan pribadi.

8) Pembiayaan Multimanfaat BTN iB

Pembiayaan konsumtif perorangan khusus bagi para pegawai dan pensiunan. Pembiayaan ini digunakan untuk keperluan pembelian berbagai jenis barang elektronik atau furniture dengan menggunakan akad Murabahah (jual beli).

9) Pembiayaan Tunai Emas BTN iB

Pembiayaan nasabah untuk memenuhi kebutuhan dana nasabah dengan berdasarkan akad Qardh, Rahn, Ijarah yang diberikan bank kepada nasabah berdasarkan kesepakatan dan disertai surat gadai.

10) Pembiayaan Kontruksi BTN iB

Pembiayaan dengan prinsip akad kerja sama Musyarakah yang diberikan kepada pengembang perumahan dan bisnis sejenis untuk menyediakan modal kerja guna membiayai kontruksi proyek perumahan, termasuk infrastruktur terkait.

11) Pembiayaan Investasi BTN iB

Pembiayaan dengan prinsip jual beli (murabahah) atau kerja sama (musyarakah) yang diberikan kepada nasabah lembaga atau perusahaan untuk memenuhi kebutuhan belanja modal (*capital expenditure*) dalam

rangka rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, atau meningkatkan kapasitas usaha.

12) Tabungan BTN Sempel Ib

Tabungan untuk pelajar PAUD, TK, SD, SMP, SMA, Madrasah (MI, MTs, MA) atau sederajat, guna meningkatkan budaya menabung sejak dini dengan syarat mudah dan bebas biaya, menggunakan prinsip syariah yaitu akad "Wadiah" (Titipan).

13) Berkah Deposito

Program pemberian hadiah kepada Nasabah perorangan yang melakukan pembukaan rekening Deposito.

14) Deposito BTN Ib

Investasi perorangan atau lembaga dengan jangka waktu yang fleksibel dan memiliki bagi hasil yang kompetitif untuk memenuhi berbagai kebutuhan di masa yang akan datang.

15) Giro Prima BTN iB

Produk simpanan dengan prinsip Mudharabah Mutlaqah, nasabah akan mendapatkan bagi hasil yang menguntungkan guna memperlancar aktivitas bisnis.

3. Prinsip Operasional Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah

- 1) Al Quran dan sunnah sebagai landasan utama penerapan prinsip syariah dalam perekonomian
- 2) Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) – MUI tentang lembaga keuangan Syariah
- 3) Undang undang tentang perbankan UU NO 10 tahun 1998 tentang perubahan UU NO .7 tahun 1992 tentang perbankan dan UU NO. 10 tahun 2008 tentang perbankan syariah
- 4) PBI No. 11/3/PBI2009 tentang Bank Umum Syariah dan PBI No.11/23/PBI/2009 tentang Bank Perkreditan Rakyat
- 5) PSAK (persyaratan standar Akuntansi Keuangan) No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah tentang Murabahah.
- 6) PAPSI (Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia).
- 7) Ketentuan kehati-hatian.
- 8) Peningkatan Efisiensi Operasional dan Daya saing yang tinggi.
- 9) Stabilitas sistem Perbankan Syariah dan kemanfaatan bagi perekonomian.²⁷

²⁷ R Rofahada, “Analisis Sistem Perbankan Syariah Pada PT. Bank BTN Syariah Di Makassar,” 2020, <http://repository.uin-alauddin.ac.id/4881/>.

4. Prinsip Manajemen Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah

Pelaksanaan manajemen Bank Tabungan Negara Syariah sebagai berikut:

1) Risiko kredit

Proses pelaksanaan penanganan risiko kredit yaitu sebagai berikut : Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, kebijakan Prosedur dan Penetapan Limit, Proses Identifikasi Pengukuran, Pemantauan, Pengendalian kredit, dan sistem informasi manajemen risiko kredit.

beberapa tindakan atau upaya dalam penanganan kredit macet sebagai usaha dalam mengatasi terjadinya penunggakan pembayaran meliputi: Penataan kembali dengan cara menambahkan jumlah kredit atau penambahan modal terhadap usaha debitur (*Restructuring*), persyaratan kembali (*Reconditioning*), Penjadwalan kembali (*Recheduling*).

2) Risiko Pasar

Pelaksanaan manajemen risiko pasar di BTN syariah dilakukan dengan cara risiko pasar dikelola dalam batas risiko secara menyeluruh dengan menggunakan teknik lindung nilai (*hedging*). Program dari BTN Syariah terkait penanganan manajemen risiko pada pembiayaan yaitu dengan cara

mengadakan penelitian pasar/market *research* untuk memperoleh informasi pasat secara berkesinambungan.

3) Risiko Operasional

Dalam pelaksanaan manajemen risiko pembiayaan khususnya risiko operasional BTN Syariah Parepare mengembangkan program untuk memitigasi risiko operasional seperti pengamanan proses teknologi informasi, asuransi, dan *outsourcing*. Risiko operasional ini diakibatkan karena proses internal bank yang kurang memadai. Beberapa hal yang bisa mencegah risiko operasional di bank dengan menggunakan Sumber Daya Manusia yang terlatih dan professional dibidangnya, seperti mengadakan program pembinaan atau pelatihan kepada karyawan.²⁸

5. Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat dasar teoritis dan kontekstual dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini, beberapa penelitian terdahulu yang relevan dijadikan acuan :

1. **Rizki & Fadilah (2021)** dalam penelitiannya berjudul “ *Peningkatan Literasi Keuangan Syariah Melalui Edukasi Komunitas di Desa Sukaraja* “ menemukan

²⁸ Nurhidayah, “IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBIAYAAN DI BANK BTN SYARIAH PAREPARE Oleh:,” 2019, 1–103, <http://repository.iainpare.ac.id/1195/1/15.2300.118.pdf>.

bahwa Literasi masyarakat Desa dapat meningkat secara signifikan setelah dilaksanakan pelatihan interaktif yang dilakukan oleh mahasiswa KKN.

2. **Wulandari, et al. (2022)** melalui penelitian “ *Efektivitas Sosialisasi Produk BTN Syariah terhadap Minat Menabung di Desa Margodadi* “ menunjukkan bahwa kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh Mahasiswa secara langsung dapat meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan produk BTN Syariah.
3. **Setiawan (2023)** dalam studinya “ *Avoidance of Riba-Based Loans and Enhancement of Quality of Life: An Indonesian Context Analysis* “ menyatakan bahwa pemahaman terhadap prinsip dasar perbankan Syariah memiliki korelasi yang kuat dengan keputusan keuangan yang lebih sehat di komunitas muslim pedesaan.